



**REPUBLIK INDONESIA**  
**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPUTUSAN**  
**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN**  
**BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR : 28 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA PENELITIAN DAN PENALAAHAN PAGU INDIKATIF TAHUN**  
**ANGGARAN 2019**

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN**  
**BARANG/JASA PEMERINTAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Penelaahan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2019 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan Tim Pelaksana Penelitian dan Penelaahan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2019 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota pada Tim Pelaksana Penelitian dan Penelaahan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2019 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Penelitian dan Penelaahan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2019 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA PENELITIAN DAN PENELAAHAN PAGU INDIKATIF TAHUN ANGGARAN 2019 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/AJASA PEMERINTAH**
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Penelitian dan Penelaahan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2019 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lmpiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana Penelitian dan Penelaahan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2019 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyusun dan merencanakan pelaksanaan Penelitian dan Penelaahan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2019 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Penelitian dan Penelaahan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2019 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Penelitian dan Penelaahan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2019 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- KEEMPAT : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pelaksana Penelitian dan Penelaahan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2019 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini
- KELIMA : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak berlakunya putusan ini sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Mei 2018

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH.**

ttd

**SALUSRA WIDYA**

Tembusan:

1. Kepala LKPP;
2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana LKPP;
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana LKPP;
4. Bendahara Pengeluaran LKPP;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS  
UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG  
TIM PELAKSANA RAPAT  
KOORDINASI TEKNIS LEMBAGA  
KEBIJAKANBARANG/JASA  
PEMERINTAH.**

**NOMOR : 28 TAHUN 2018  
TANGGAL : 2 MEI 2018**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PELAKSANA PENELITIAN DAN PENELAAHAN PAGU INDIKATIF TAHUN  
ANGGARAN 2019  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No.	Kedudukan Dalam Tim		Nama	Honorarium
1	Ketua	:	Iwan Herniwan	0
2	Sekretaris	:	Yasip Khasani	0
3	Anggota	:	1. R. Adha Pamekas	0
			2. Devi Yanurida	0
			3. Mirna Medita Endikasari	0
			4. Nicke Kusuma Devi	0
			5. Arso Hadi Wardono	0
			6. Lintong Janji Natogu Sinambela	0
			7. Angga Widita Amirul	0
			8. Satriyo Wibowo	0
			9. Festiana Niyanti	0
			10. Mario Duwi Cahyo	0
			11. Hilma Oktaviani	0
			12. Mukti Herlambang	0
			13. Ivana Suprpto	0
			14. Setiawan Rahandi	0
			15. Anita Meilani	0
			16. Angky Dwi Seffyanto	0
			17. Intan Dana Lestari	0
			18. Iqbal Amaludin	0
			19. Tri Tarwoco	0
			20. Estu Retno Yuliati	0
			21. Prima Salti	0
			22. Anindita Widya Sismiati	0
			23. Citra Destrianindya	0

		24. Ferawati	0
		25. Mutiara Karina	0
		26. Ribut Aji K	0
		27. Elvi Egyasti	0
		28. Hazhiyah Ghaisani	0
		29. Rosadilah Herman P	0
		30. Aprian Mustofa	0

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH.**

ttd

**SALUSRA WIDYA**